

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan pengetahuan dibidang akuntansi, tidak hanya mempersembahkan suatu kebaikan akan tetapi juga dapat menjadi salah satu sumber persoalan. Yang mana persoalan yang kerap kali terjadi ialah fraud atau disebut juga dengan kecurangan. Saat ini fraud atau kecurangan semakin sering terjadi, yang mana hal tersebut menjadi pusat atensi publik dan beragam media masa dan elektronik baik di dalam ataupun di luar negeri. Adapun bentuk contoh dari fraud yang dilakukan pada sektor publik ialah kecurangan yang dilaksanakan dalam motif kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Terdapat berbagai macam jenis kejahatan yang termasuk pada kategori fraud yang dilakukan oleh oknum kerah putih (*white collar crime*), diantaranya yakni tindak pidana korupsi atau disebut dengan penggelapan dana, memanipulasi informasi, penyelewengan terhadap kewajiban, serta memanipulasi fakta atau kebenaran. Fraud atau berbagai jenis kecurangan lainnya seringkali terjadi di berbagai sektor, baik pada sektor swasta maupun sektor pemerintahan. Dan kasus utama yang kerap terjadi khususnya pada instansi pemerintahan serta instansi swasta ialah kasus tindak pidana korupsi. Dimana pada instansi pemerintah, kasus korupsi tidak hanya menyeret orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi namun juga pegawai yang berada pada tingkat *low management* serta bukan hanya muncul pada lingkungan pemerintah pusat melainkan juga berlangsung pada pemerintah daerah. (Albar and Fitri 2018)

Teori *Fraud Triangle* yang dijabarkan (Cressey, 1953) mengemukakan bahwa terdapat tiga hal yang mampu menstimulasi seorang individu untuk

menjalankan suatu kecurangan atau fraud yakni *pressure, opportunity*, dan justifikasi. Kemudian hasil penelitian yang diperoleh Cressey disempurnakan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Wolfe dan Humanson, 2004) dengan memperbanyak aspek yang mampu memotivasi seorang individu melaksanakan kecurangan yakni aspek kemampuan (*capability*) hingga dikenal dengan *Fraud Diamond Theory*. Kemudian akhir perluasan teori fraud dilakukan pada tahun 2011 oleh peneliti Crowe Howarth yakni menyempurnakan faktor pendorong dengan unsur arrogance sehingga dikenal dengan sebutan *Fraud Pentagon*. Penyempurnaan faktor pendorong terjadinya fraud, maka dapat disimpulkan bahwa termuat lima hal yang melandasi seseorang menjalankan tindak fraud yaitu *pressure, opportunity, rationalization, competence* dan *arrogance*.

Pada umumnya kecenderungan kecurangan akuntansi berhubungan dengan penggelapan dana. Perbuatan yang lumrah dilakukan dalam penggelapan dana atau korupsi ialah penyelewengan pembukuan, memusnahkan informasi dan mark up yang merugikan negara (Novikasari, 2017). Kota Bandar Lampung memiliki 8 badan, 24 dinas dan 10 bagian OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Menurut (Sugiyono, 2017) ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500, maka peneliti menggunakan 10 dinas OPD di kota Bandar Lampung sebagai populasi penelitian dengan masing-masing 5 responden. OPD Kota Bandar Lampung pun tak luput dari permasalahan tendensi penyelewengan akuntansi masih marak terjadi baik pada instansi pemerintah maupun swasta.

Faktanya, fenomena kecenderungan kecurangan akuntansi pada OPD Kota Bandar Lampung terlihat pada kasus korupsi yang dilakukan di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura. Berdasarkan info bahwa terdapat kasus penggelembungan harga atau mark up menjadi kasus paling dominan dalam sejumlah kasus dugaan korupsi diikuti dengan kasus penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, laporan fiktif,

pemotongan anggaran, proyek terlantar, dan proyek tidak sesuai spek. Salah satu kasus tersebut juga terjadi pada Kota Bandar Lampung. Dilansir melalui (Amri, 2021) bahwa terungkap kasus korupsi benih jagung pada tahun 2021 dari dana anggaran kementerian pertanian, yang menghilangkan pendanaan negara sebesar Rp. 7,5 miliar. Yang melibatkan 2 tersangka yakni, Edi Yanto, mantan kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dan pihak rekanan Imam Mashuri selaku direktur PT Dempo Agro Pratama Inti sebagai sarana pertanian dan obat-obatan di kota Bandar Lampung.

Kasus berikutnya yang ada di OPD kota Bandar Lampung adalah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Seperti diketahui pada tahun 2020, dikucurkan pendanaan yang berasal dari APBD dan dana Swakelola senilai Rp.40,8 Milyar, untuk membiayai paket penyedia sebanyak 62 paket penyedia. Dimana dari 62 paket penyedia, diduga adanya indikasi Mark-up hingga pungutan setoran proyek yang mencapai, 20% hingga 25% (Hadi, 2020).

Kemudian pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Bandar Lampung, Pekerjaan pembangunan Gedung SMPN 41 PT HMP berdasarkan surat perjanjian Nomor 03/Kontrak/KONS.22/IV.40/2020 tanggal 28 April 2020 sebesar Rp9.178.024.545,45 atau termasuk PPN sebesar Rp10.095.827.000,00. Kontrak tersebut telah diubah dengan Adendum 01 Nomor 03.a/ADD.1/Kontrak/KONS.22/IV.40/2020 tanggal 18 September 2020 yang mengatur tambah kurang pekerjaan dan penambahan jangka waktu pelaksanaan. Setelah mengalami perubahan, rentan waktu aktualisasi kerja selama 240 hari kalender terhitung mulai tanggal 28 April s.d. 31 Desember 2020. Sampai dengan 31 Desember 2020, pekerjaan tersebut telah dibayar sebesar Rp2.019.165.400,00 (20%) dengan SP2D Nomor 002993/SP2D/LS/07/2020 tanggal 15 Juli 2020. Pekerjaan tersebut dinyatakan selesai 100% dan telah diserahkan berdasarkan

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor 13/PHO/IX/IV.40/2021 tanggal 18 Januari 2021 sehingga terdapat keterlambatan selama 18 hari kalender. Atas keterlambatan selama 18 hari, PPK dan penyedia jasa konstruksi sepakat mengenakan denda keterlambatan terhadap sisa pekerjaan, yaitu senilai Rp381.355.000,00. Sehingga, terdapat denda keterlambatan senilai Rp6.864.390,00 (18 hari $1/1000 \times \text{Rp}381.355.000,00$) yang belum disetorkan oleh penyedia jasa konstruksi ke Kas Daerah. Hasil pemeriksaan dokumen back up data, as built drawing, dan foto dokumentasi serta pengujian fisik secara uji petik bersama PPK, penyedia jasa konstruksi, dan konsultan pengawas menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp170.027.770,62. Kekurangan volume terjadi diantaranya pada item pekerjaan beton, bekisting, pembesian, lantai keramik, dan sumur bor. (BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung)

Dari beberapa kasus diatas terdapat bahwa sistem pengendalian internal yang masih kurang, Integritas yang rendah, Asimetri Informasi antara atasan dan bawahan, dan Kesesuaian Kompensasi yang tidak sesuai bagi pegawai instansi.

Pengelolaan internal disusun bertujuan untuk menyampaikan suatu kepastian yang layak guna menyajikan laporan keuangan dengan handal, efektif dan efisien, serta patuh pada hukum dan aturan yang ada. Selain itu, pengelolaan internal menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya kemungkinan kecurangan. Hal ini dikarenakan, proses pencegahan dan pengendalian terhadap berbagai resiko kecurangan akan efektif dan efisien jika pengelolaan internal juga dilaksanakan secara baik dan benar. Pengelolaan internal ialah keseluruhan sumber daya yang terdapat pada suatu perusahaan atau instansi yang dipakaiguna meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi setiap operasional perusahaan guna meyakinkan perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan

baik (Kundoyo and Amanah, 2019). Sehingga setiap kebijakan dan standar operasional wajib dilaksanakan oleh keseluruhan sumber daya institusi sesuai dengan sistem dan standar yang telah disusun dan ditetapkan.

(Butler dan Cantrell 1984), di dalam (Hosmer, 1995) menginterpretasikan integritas dalam ranah organisasi sebagaimana baik yang dapat diakui dan kredibel dari seseorang guna mendeskripsikan istilah kata “kepercayaan”. Sedangkan (Jacobs, 2004) menunjukkan bahwa Integritas menegaskan kestabilan moral, kesempurnaan diri, atau validitas diri. Integritas merupakan bentuk tanggung jawab diri yang yakin akan prinsip ideologi yang bermartabat serta menjadi bagian dari karakteristik diri yang perlihatkan dengan perilaku. Hal yang melatarbelakangi penambahan variabel integritas ialah pada Integritas menunjukkan bahwa seseorang harus berperilaku jujur dan terbuka, berani, berbudi serta berkomitmen. Karena kecurangan akan muncul apabila integritas tidak dilaksanakan secara benar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari & Dewi, 2020) sebagai penelitian terdahulu hasilnya memperlihatkan bahwa integritas mempunyai dampak negatif terhadap kecurangan akuntansi. Dimana artinya bahwa integritas dapat meminimalisir risiko kecurangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Nita and Supadmi, 2019) tentang tindak kecurangan akuntansi memperlihatkan bahwa integritas juga berpengaruh negatif terhadap kecurangan dalam akuntansi.

Asimetri informasi ialah ketidakserasian data yang dimiliki antara principal dan pemasok, tatkala principal tidak mempunyai data yang memadai terkait kapasitas pemasok, sebaliknya pemasok mempunyai lebih banyak data terkait kemampuan diri, lingkungan kerja, serta data keseluruhan mengenai perusahaan (Senja, 2011). Asimetri informasi antara pimpinan dan inferior terjadi mampu berdampak pada laporan keuangan yang dapat menjadi sebab terjadi fraud (Aranta, 2013). Karena laporan keuangan seharusnya menjadi

hal yang penting bagi para pengguna eksternal terlebih dalam kondisi tidak ada kepastian informasi. Apabila terdapat ketimpangan informasi maka dapat memberikan kesempatan bagi oknum pengelola aset untuk melancarkan kecurangan. Sehingga asimetri informasi dapat memperlihatkan adanya kecurangan antara pimpinan dan pegawai.

(Suwatno dan Priansa, 2014) memaparkan bahwa pembayaran kompensasi penting untuk dipisahkan berupa gaji dan upah, hal ini dikarenakan karakteristik kompensasi berbeda dengan karakteristik gaji atau upah. Gaji dan upah ialah wujud nyata dari pembayaran kompensasi. Secara detailnya, kompensasi tidak hanya berbentuk gaji atau upah, namun terdapat pembayaran lainnya. Sementara (Rivai, 2013) mendeskripsikan kompensasi sebagai suatu hal yang diberikan kepada para pegawai atas substitusi pemberian pertolongan mereka kepada suatu perusahaan. Kompensasi yaitu anggaran pokok atas kemampuan atau dan kapasitas serta kelayakitan dalam operasional perusahaan. Oleh karena itu kompensasi menjadi pertimbangan utama para pekerja ketika mencari dan memilih suatu pekerjaan.

Pada dasarnya penelitian ini adalah bentuk perluasan dari penelitian yang dilakukan oleh (Sela, 2021) dengan judul penelitian Pengaruh Pengendalian Internal, Integritas dan Asimetri Informasi terhadap Kecurangan Akuntansi. Kemudian peneliti menambahkan variabel kesesuaian kompensasi untuk perluasan dari penelitian sebelumnya. Kesesuaian kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai sebagai akibat dari pelaksanaan di organisasi dalam bentuk uang atau lainnya, yang dapat berupa gaji, upah, bonus, insentif dan tunjangan lainnya. Kompensasi yang diterima karyawan harus sesuai dengan kontribusi yang diberikan karyawan kepada organisasi. pemberian kompensasi yang sesuai kepada karyawan dapat memberikan kepuasan dan motivasi kepada karyawan dalam bekerja. Kurangnya kesesuaian kompensasi akan menimbulkan ketidakpuasan karyawan dan akan menyebabkan kecenderungan kecurangan akuntansi

(Purwati, 2020). Dimana objek penelitian yang dipakai ialah OPD Kabupaten Kuantan Singingi, dan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan objek penelitian yaitu OPD Kota Bandar Lampung.

Didasarkan pada pemaparan latar belakang diatas, maka dengan ini penulis melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Pengendalian Internal, Integritas, Asimetri Informasi Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi”***
(Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung)”

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan untuk mencari tahu seberapa besar pengaruh pengelolaan atau pengendalian internal, integritas, asimetri informasi dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung). Ruang lingkup penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup Subjek

Subjek pada penelitian ini ialah variabel Independen (X) dan Dependen (Y) variabel independen yakni pengendalian internal, integritas, asimetri informasi dan kesesuaian kompensasi. Sementara itu, untuk variabel dependen yakni Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.

2. Ruang Lingkup Objek

Objek dalam penelitian ini ialah pegawai bagian keuangan pada OPD Kota Bandar Lampung.

3. Ruang Lingkup Tempat

Penelitian ini dilaksanakan dengan memanfaatkan data kuantitatif berbentuk nilai dari skor atau respon yang dibagikan oleh responden terhadap butir-butir soal yang ada pada lembar kuisioner.

4. Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan

Ilmu pengetahuan yang digunakan dalam penelitian ini ialah tentang pengendalian internal, integritas, asimetri informasi dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang ada dalam latar belakang dapat di rumuskan masalah penelitian yakni sebagai berikut :

1. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di OPD Kota Bandar Lampung?
2. Apakah Integritas berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di OPD Kota Bandar Lampung?
3. Apakah Asimetri Informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di OPD Kota Bandar Lampung?
4. Apakah Kesesuaian Kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di OPD Kota Bandar Lampung?

1.4 Tujuan Penelitian

Pengaruh Pengendalian Internal, Integritas, Asimetri Informasi dan konsistensi Kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi di OPD Kota Bandar Lampung.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Integritas terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi di OPD Kota Bandar Lampung.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi di OPD Kota Bandar Lampung.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kesesuaian Kompensasi

terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi di OPD Kota Bandar Lampung.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini untuk membagikan gambaran perihal materi yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, perlu juga dibuat sistematika penulisannya, yakni manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu dipergunakan sebagai referensi bagi para akademisi guna membagikan partisipasinya terhadap perluasan model yang lebih kompleks dari penelitian terdahulu. Dan diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi sumberpengetahuan dan dapat memberikan data yang berfaedah bagi peneliti selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan informasi ataupun wacana mengingat tentang penelitian pengaruh komitmen organisasi, kesamarataan kompensasi dan bentuk pengawasan internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan perihal latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan perihal landasan teori, pembahasan hasil penelitian sebelumnya, perumusan hipotesis serta kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan perihal metode yang berisi penjelasan variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data penetapan teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi perihal deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan, dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian yang serupa dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN